



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DENGAN
SULAWESI TENGGARA DEMOKRASI MONITORING (SuLTRaDeMo)**

NOMOR : 316.G/PM.00.01/K.SG/07/2023
NOMOR : 14/EKS/MOU/SulTraDeMo/07/2023

TENTANG

**PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **12** bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di **Kendari**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Iwan Rompo Banne, S.Sos., M. Si
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No.125, Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, 93121

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Arafat, SE., MM
Jabatan : Ketua Lembaga SulTraDeMo
Alamat : Jl. Laode Hadi Bypass, Kompleks Mandara Square, Blok B No 07-08, Kota Kendari, 93117

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sulawesi Tenggara Demokrasi Monitoring (SulTraDeMo), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kesepahaman dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara berbentuk satuan kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. PIHAK KEDUA adalah Sulawesi Tenggara Demokrasi Monitoring (SulTraDeMo), merupakan lembaga yang melaksanakan program pendidikan pemilih dan pemantauan pemilu.
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengembangan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dengan melibatkan masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan pegiat Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman

tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pengetahuan serta perubahan sikap dan perilaku mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu; dan
 - b. mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penguatan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui peran masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan pegiat Pemilu; dan
- b. pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing pihak dalam penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- 3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- 1) Segala perubahan atas hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jalan Dr. Sam Ratulangi No.125, Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari,
93121.

Telp : 0401-3131943 / 081241015905

Email : ppidbawaslusultra@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

SULAWESI TENGGARA DEMOKRASI MONITORING (SULTRADEMO)

Jl. Laode Hadi Bypass, Kompleks Mandara Square, Blok B No 07-08, Kota
Kendari, 93117

Telp : 08125161970

Email : ngo.sultrademo@gmail.com

- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama .
2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.


PIHAK KESATU
BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ROMPO BANNE
(Ketua)

PIHAK KEDUA
KETUA SULTRADEMO

ARAFAT, SE., MM
